

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*. Cetakan Pertama (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

Budiarta, I Nyoman Putu. *Hukum Outsourcing*. (Malang: Setara Press, 2016).

Damanik, Sehat. *Outsourcing dan Perjanjian Kerja*. (Jakarta: Dss Publishing, 2006).

Djumadi, *Hukum Perburuhan (Perjanjian Kerja)*. Cetakan Kelima. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

Djumaldji, *Perjanjian Kerja*. Cetakan pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Fahroji, Ikhwan. *Hukum Perburuhan (Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional)*. Cetakan Pertama. (Malang: Setara Press, 2016).

Fajar, Mukti ND. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cetakan ke-4 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017).

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Cetakan Keempat. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

Jehani, Libertus. *Hak-hak Karyawan Kontrak*. (Jakarta: Praminta Offset, 2008).

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Pada Umumnya*. Cetakan pertama. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

Soedarjadi. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia (Panduan bagi Pengusaha, Pekerja, Dan Calon Pekerja)*. Cetakan I. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. (Jakarta: UI Press, 1984).

Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*. Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995).

Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Uwiyono, Aloysius et al. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)*.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Kasasi Nomor 712 K/ Pdt.sus-PHI/2018.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 327/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.

D. Jurnal

Khairanil. “Kedudukan *Outsourcing* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011”. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014.

Saraswati, Retno. “Problematika Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Yustisia Vol.2 No. 3 September-Desember 2013.

Tamponganyoy, Falentino. “Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia”, Lex Privatum, Vol.1/No.1 Tahun 2013 Januari-Maret.

Triyono. “Outsourcing Dalam Perpektif Pekerja dan Pengusaha”. Jurnal Kependudukan Indonesia Vol.VI, No.1, 2011.

E. Kamus

Buruh (Def.1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/buruh>, 12 Maret 2020.

F. Artikel (Non Hukum)

Anonim. “PHI Tentukan Tiga Unsur Kumulatif Pekejeraan Bersifat Tetap”. *www.buruh-online.com*, 28 Mei 2019.

Hukum Online. “Prof. A. Uwiyono: UU Ketenagakerjaan, UU Kanibalisme” .*www.hukumonline.com*, diakses pada tanggal 14 Mei 2020, pukul 16.00 WIB.

Kresna. “Pengertian Kerangka Konsep Penelitian (skripsi dan tesis). *www.konsultasiskripsi.com*, 28 Mei 2019.

M.RizqiHengki. “Apa saja Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi?”, *kompasiana.com*, diakses pada 9 Juni 2020, pukul 15.00.